

Perilaku Kekerasan: Analisis Menurut Sistem Budaya dan Implikasi Edukatif

□ ***Drs.H. Ahmad Hufad, M.Ed***
(Universitas Pendidikan Indonesia)

Abstrak

Secara faktual fenomena tindak kekerasan masih saja terjadi dalam kehidupan masyarakat, padahal siapapun, ajaran agama dan kepercayaan yang ada didunia ini tidak akan pernah memberikan legitimasi, justru banyak pihak yang nyaris mengalami frustrasi terhadap fenome kekerasan.

Sejalan dengan dinamika perkembangan peradaban manusia yang semakin maju, seyogyanya segala bentuk tindakan kekerasan mestinya tidak perlu terjadi dan atau disengaja muncul (violence by design), sebab segala bentuk tindakan kekerasan tidak mencerminkan tindakan manusia yang berbudaya.

Oleh karena itu melalui artikel ini akan diuraikan fenomena empirikal perilaku kekerasan dalam perspektif kultural dan implikasinya terhadap pendidikan. Sehingga uraian berikut akan menyajikan fokus bahasan berdasar pada: (1) fakta dan analisis terhadap bentuk tindakan kekerasan; (2) kerangka teoritik dalam memahami perilaku kekerasan; (3) hubungan perilaku kekerasan dengan produk belajar; (4) simpulan dan implikasi edukatif sebagai upaya kearah pemecahan.

Kata Kunci : Perilaku kekerasan, Budaya, dan Implikasi Edukatif.

Bentuk tindakan kekerasan dari seseorang kepada orang lain, dari suatu kelompok kepada kelompok lainnya dengan motif apapun adalah tergolong sebagai perilaku menyimpang, dan karena itu tidak bisa dibenarkan menurut norma-norma sosial. Fenomena tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun institusi sosial hingga kini tetap saja berlangsung.

Fenomena tindakan kekerasan itu menunjukkan grafik menaik seiring dengan laju dari proses reformasi, yang jelas-jelas antara keduanya (kekerasan dan reformasi) sangat kontradiktif. Gerakan reformasi itu seharusnya dipandang sebagai upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Tindakan kekerasan adalah berkonotasi negatif, destruktif, tetapi justru tindakan kekerasan seolah-olah dianggap sebagai *sebuah kebiasaan baru* dalam menyelesaikan masalah sosial yang muncul di masyarakat saat ini.

Realita yang tengah kita hadapi adalah

munculnya intensitas dan kualitas tindakan kekerasan yang dilakukan diantara sesama warga masyarakat, aparat negara kepada masyarakat, dan bahkan dari masyarakat kepada aparat negara (keamanan). Pemunculan kondisi ini dapat dilihat dari kasus-kasus: kerusuhan sepanjang tahun 1996/1997 hingga tahun 1999, baik di Pulau Jawa maupun di Luar Pulau Jawa.

Bentuk kekerasan itu memiliki ragam wujud tindakan, mulai dari yang berdimensi terbatas pada satu kasus tertentu, sampai kepada wujud yang multidimensi, dan memiliki tali temali dengan supra struktur kekuasaan tertentu. Akumulasi tindakan kekerasan yang terjadi di Indonesia telah membawa pada suatu situasi yang mencekam dan selalu dicermati oleh pihak luar, karena selain banyak menelan korban harta benda, juga penghilangan kehormatan kemanusiaan, dan korban jiwa.

Di dalam setiap tindakan kekerasan yang dilakukan secara individual, massal, atau instansional cenderung berlaku hukum rimba, yang bahkan tindakan kekerasan yang dilakukan

oleh sebuah kelompok masyarakat terhadap yang lainnya, diikuti dengan pembalasan yang diarahkan kepada individu, kelompok dan masyarakat yang tidak terkait langsung dengan tindakan kekerasan tersebut, jadi seolah-olah tampak sebagai ungkapan rasa solidaritas.

Segala bentuk tindakan kekerasan hampir pasti bersifat destruktif dan tidak mengindahkan rasionalitas pikiran manusia, yang menafikan sistem nilai yang ada. Apabila kekerasan bukan bagian integral dari watak bangsa Indonesia, tetapi mengapa kekerasan selalu ada dan digunakan dalam praktek kegiatan dalam berbangsa dan bernegara. Masalah tindakan kekerasan ini semakin menarik untuk didiskusikan ketika sistem budaya yang terbentuk ini berimplikasi pada praktek pendidikan.

Tindakan Kekerasan : Fakta dan Analisis

Pengertian kekerasan dalam ilmu sosial memiliki dua pengertian pokok. *Pertama* semua kejadian yang unsur utamanya penggu-

naan atau ancaman penggunaan kekerasan. *Kedua* diartikan sebagai “any avoidable impediment to self-realization” (Galtung, dalam Mochtar Mas’oed, 1997) artinya segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Kemudian ‘Galtung’ membagi jenis kekerasan menjadi: langsung atau personal dan tidak langsung atau struktural.

Kekerasan langsung adalah yang dilakukan oleh suatu kelompok aktor kepada pihak lain (*violence as action*), kekerasan tidak langsung merupakan sesuatu yang builtini dalam suatu struktur (*violence as structure*) kekerasan langsung dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan alat kekerasan. Kekerasan struktural terjadi begitu saja, tidak ada aktor tertentu yang melakukannya.

Berangkat dari dua pengertian itu maka dalam realita, kekerasan itu tidak hanya dilakukan oleh sekelompok anggota masyarakat, tetapi juga dilakukan oleh pejabat negara dan bahkan pengendali kapital swasta. Dari konseptual ini ‘Galtung’ pilahan tampak pada tabel berikut :

Tabel :
KARAKTERISTIK TINDAK KEKERASAN
DALAM MASYARAKAT

ARAS	PELAKU	DIMENSI	MEDIUM/SARANA	RUANG LINGKUP
Negara	Aparat negara	Fisik Non fisik (teror mental)	Senjata dan organisasi tentara dan polisi	Komprehensif
Struktur Sosial	Aparat negara Pengendali Kapital	Non-fisik (politik, ekonomi sosial, budaya)	Kebijakan publik Proses dan sarana produksi/akumulasi kapital	Komprehensif
Komunitas	Individu Kelompok	Fisik	Kelompok anomie, Tindakan individual	Terbatas

Atas dasar kerangka konseptual tindakan kekerasan tersebut mari kita lihat bagaimana kondisi dan perkembangan yang terjadi hingga saat ini, khususnya peristiwa-peristiwa sepanjang tahun 1996-2001. Dari tahun 1996- hingga kini, dapat diidentifikasi sejumlah tindakan kekerasan di masyarakat, seperti: (1) tawuran antar<pelajar dan antar><suporter (di kota, di pelosok), (2) pertentangan dalam kampanye Pemilu, (3) kerusuhan rasial (seperti peristiwa di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Poso, Maluku, Jakarta, Tasikmalaya, Rengasdengklok, Situbondo, Madura, Yogyakarta, dan Pinrang) (4) Akibat demonstrasi mahasiswa; dan (5) perampokan, perkosaan, penculikan, dan dukun santet.

Keseluruhan tindakan kekerasan sebagai fenomena keseharian yang sering dijumpai itu biasanya disangkal banyak orang sebagai cerminan karakter-budaya bangsa, walupun demikian tetap saja tidak bisa dihindarkan keberadaannya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Faktor-faktor dasar yang menjadi pemicu munculnya tindakan kekerasan dapat disusun berbagai alasan (Armando Riyanto, 1998); diantaranya :

1. Kesenjangan atau kecemburuan sosial, yang tidak dapat dipecahkan dengan penggusuran, atau menghilangkan orang lain.
2. Memperjuangkan demokrasi dan keadilan; walaupun antara demokrasi dan kekerasan adalah sebuah kontradiksi, karena demokrasi intinya ialah wahana perwujudan kebebasan dalam mencapai keadilan, sedangkan kekerasan justru dapat menyebarkan ketakutan dan kekacauan yang tidak menentu, yang lebih berakar pada kesempatan pandangan.
3. Kekerasan bagian dari skala besar reformasi dan pembangunan bangsa.

4. Kekerasan merupakan tindakan spontan emosional dari sebahagian individu dan kelompok yang marah karena terpengaruh isu yang berlanjut menjelma menjadi kekerasan.
5. Akibat konflik agama, walaupun demikian konflik agama dalam budaya yang menjadi kekerasan untuk membela agama tidak bisa dijustifikasi, karena agama bertalian dengan ajaran ketakwaan.

Menurut ilmu sosial (*Ikrar Nusa Bhakti, 1997:105*) dalam identifikasi penyebab kekerasan di beberapa tempat adalah dikarenakan oleh: (1) menumpuknya keresahan dan ketidak<puasan masyarakat atas situasi sosial, ekonomi dan politik dalam kehidupannya; (2) tersumbatnya aspirasi masyarakat dalam format pembangunan politik dan ketimpangan antara pembangunan ekonomi dengan pembangunan politik dan hukum; (3) gejala kemiskinan dan tajamnya ketimpangan dalam struktur masyarakat bawah atau antara si kaya dan si miskin; (4) terjadi praktek kolusi, korupsi dan manipulasi yang intensitasnya sangat tinggi; dan (5) Ketimpangan distribusi aset ekonomi yang tidak merata.

Hobbes, Le Bon, dan Durkheim mengaitkan kekerasan dalam perspektif “the nature of man”—sifat dasar manusia sebagai homo sapiens, barbarianisme, anomie—suatu kondisi hilangnya orientasi masyarakat yang mempengaruhi tindakan kekerasan. Itu menyebabkan para pelaku kekerasan bergerak terus tanpa rasa bersalah, dengan menafikkan nilai-nilai kehidupan, yang kemudian mengaburkan motif dan tujuannya. Thomas Hubbes menyebut hasil itu sebagai bellium omnium contra omnes (perang dari dan oleh semua). Apabila dikaitkan dengan perspektif wujud dan intensitas tindakan kekerasan ini, dan manakala tidak dapat dicari solusinya, bukan tidak mungkin kemudian menjurus ke arah tindakan kekerasan struktural dan kultural.

Gejala kekerasan itu tidak hanya dapat diamati penyebabnya, tetapi harus pula dilihat dalam kerangka pandang perpaduan antara kekerasan struktural yang dilakukan penguasa dan kekerasan kultural yang merupakan ekspresi

frustrasi masyarakat yang keduanya adalah produk dari sistem kehidupan yang tertekan.

Menurut Herbert Marcuse, aksi kekerasan seperti tersebut di atas muncul karena memang kekerasan itu sendiri sudah dilembagakan *intitutionalized violence* di bawah sistem represif yang berlebihan, yang akhirnya kekerasan melahirkan kekerasan. Prosesnya dimulai dari pemaksaan bahwa setiap individu, kelompok masyarakat harus menyesuaikan diri dengan status quo, yang tetap terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia pada era orde baru.

Pola kekerasan rezim lama telah terabaikan, tetapi kemudian muncul pola dan bentuk kekerasan baru sebagai wujud perlawanan terhadap status quo, yang oleh Marcuse disebut pembangkangan sosial *civil disobedience*. Pembangkangan itu diharapkan dapat membentk masyarakat baru yang memiliki perdamaian dan kebebasan sejati.

Setiap tindakan kekerasan sebenarnya tidak berdiri sendiri, akan tetapi selalu bersifat dialektik, berwajah dan berdampak ganda. Seperti yang pernah terjadi di Rusia, pada kampanye kekerasan yang dilakukan oleh kaum nihilis, pada awalnya dimaksudkan untuk memprotes tatanan sosial represif Raja Tsar, kemudian melahirkan kekerasan yang berlanjut.

Dalam sejarah pemerintahan di berbagai wilayah dunia penggunaan kekerasan dianggap positif, seperti yang pernah terjadi di Perancis yang disebut Pemerintahan Teror (Reign of Teror) yang diprakarsai oleh Robiespierre antara tanggal 5 September 1793 sampai 27 Juli 1794. Hingga tahun 1798, penggunaan istilah teror masih dianggap positif untuk mematahkan kekuatan melawan Revolusi Perancis (1789). Pemerintah Teror itu pernah menculik 300.000 orang, termasuk 17.000 orang yang akhirnya dieksekusi secara resmi, dan lebih banyak lagi yang mati di kamp-kamp penampunga tanpa memperoleh kepastian dan perlakuan hukum.

Faktor penyebab tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, dan bahkan sebuah rezim, pada akhirnya akan berpulang kepada potensi insaniah manusia itu sendiri. Pada setiap manusia tertimbun potensi untuk melakukan kekerasan, termasuk yang abnormal, karena tindakan kekerasan itu adalah manifestasi dari sifat agresif dan destruktif dasariah setiap manusia (*Joseph A Dowling dalam Kompas 15-12-1998*). Ekspresi sifat dasariah itu berbeda, ada yang mampu mengendalikan diri oleh konstruksi di dominasi nilai-nilai luhur, dan sebaliknya ada pula yang sulit mengendalikan agresifitasnya.

Dari beberapa studi diketahui bahwa agresivitas orang yang secara mental terganggu tidak lebih berbahaya, dibanding dengan orang atau kelompok orang yang alam pikirnya sehat justru bisa lebih berbahaya, sebab dikerjakan terencana, sistematis dan berpola dengan rekayasa tertentu. Dalam konteks ini Kuntowijoyo menganggap perlu suatu gerakan kebudayaan untuk mengembalikan kesadaran kemanusiaan. Agresivitas dalam kekerasan terjadi disebabkan oleh kesenjangan kesadaran dan perilaku. Gerakan kebudayaan itu adalah untuk mengolah dimensi kedalaman manusia, yaitu sebuah transendensi, etika dan moral, serta pengembangan estetika, yang jangka panjang dapat menaikkan kembali kesadaran manusia yang berbudaya.

Gerakan itu hanya akan efektif, jika dilakukan melalui upaya-upaya pendidikan dalam arti luas, menyeluruh, dan integratif, dimana seluruh potensi institusi sosial berfungsi secara baik.

Kerangka Teoritik Perilaku Kekerasan

Pemahaman Teoritik 'Perilaku kekerasan':

Beberapa teori yang dapat digunakan dalam memahami dan menganalisis fenomena kekerasan (individual dan massal) antar<>kelompok warga masyarakat meliputi persepsi, stereotipe, prasangka dan reduksi ketidak<>pastian. Persepsi adalah "proses dimana seseorang individu

menyeleksi, mengevaluasi dan mengorganisasi rangsangan yang datang dari luar lingkungannya” (Larry A. Samover, 1988). Dengan kata lain, persepsi adalah cara manusia mengubah energi fisik lingkungannya, seseorang dipengaruhi oleh unsur budaya yakni kepercayaan (*belief*, nilai *value*), pandangan dunia (*world view*) dan organisasi sosial.

Budaya memainkan peranan penting dalam pembentukan kepercayaan. Individu tidak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai budaya, kepercayaan dan nilai yang dapat memberi sumbangan bagi pengembangan persepsi dan sikap. Sedangkan sikap adalah kecenderungan untuk berperilaku, yang diperoleh dari cara belajar menanggapi sebuah rangsangan secara konsisten, dan lingkungan yang membentuk serta mengubah menjadi perilaku. Demikian juga pandangan dunia (*world view*) dan organisasi sosial, keluarga dan lingkungan yang lebih luas akan mempengaruhi pembentukan persepsi.

Stereotipe dapat diartikan sebagai keyakinan yang terlalu luas, atau terlalu disederhanakan atau dilebih-lebihkan mengenai suatu kategori atau sekelompok orang. Stereotipe ini mengandung kebenaran meskipun hanya sedikit, atau kadang-kadang keliru. Pada suatu saat, pandangan stereotipe ini dapat berubah jika ada faktor pengubahnya. Dimensi stereotipe terbagi atas : stereotipe yang memiliki arah negatif atau positif, dan intensitas (yakni tingkat kepercayaan, ketepatan, benar dan tidak benar) serta isi.

Prasangka adalah sikap yang kaku terhadap kelompok tertentu yang didasarkan pada kepercayaan yang keliru. Prasangka ini sulit diubah, sarat dengan emosi dan mempunyai komponen perilaku. Karena prasangka dapat diekspresikan ke dalam pembicaraan segi negatif kelompok tertentu, penghindaran (*avoidance*) terhadap orang-orang yang tidak disenangi, diskriminasi dengan jalan mengu-

cikan kelompok tertentu, serangan fisik dengan kekerasan, dan eksterminasi (pemusnahan) kelompok yang dibenci.

Implikasi stereotipe dan prasangka terhadap hubungan sosiobudaya adalah :

(1) keduanya menghalangi kontak antar budaya; (2) menghasilkan beberapa faktor negatif dalam kontak antar etnik yang akan mempengaruhi kualitas interaksi, ada distorsi dan masing-masing pihak bersikap dan berperilaku defensif, dan (3) bila keduanya semakin kuat konflik negatifnya, maka dapat menimbulkan terjadinya konflik terbuka. Prasangka dan stereotipe dapat berubah, bila (1) ada status yang sama; (2) adanya iklim sosial yang mendukung; (3) adanya imbalan dari konteks yang terjadi, dan (4) menciptakan partisipasi dari semua pihak.

Charles Burger dan Calabrese (1975) menyatakan bahwa suatu hubungan dapat berlangsung dan berkembang dengan baik, harus diawali dengan reduksi (pengurangan) terhadap ketidakpastian terhadap sesuatu yang diinginkan. Jika demikian, maka hubungan yang diharapkan berkembang baik dari kedua pihak, tidak akan terjadi. Demikian pula, rasa ketidakpastian yang berkepanjangan dapat mengakibatkan timbulnya tekanan (*stress, tension*) dan kecemasan, sehingga orang menderita, yang akibatnya tidak dapat mengendalikan lingkungannya. Untuk dapat mereduksi ketidakpastian dan meminimalisir *stress—tension* ini dapat dilakukan dengan cara-cara dialog multikultural, dengan menjalin hubungan sambung rasa antar mereka (individu, kelompok) dalam posisi dan status yang sejajar (hubungan kemitraan). Dengan demikian diharapkan mampu meminimalisir munculnya konflik sosial yang destruktif.

Secara psikologis para ahli bersepakat bahwa tindakan manusia selalu dipengaruhi tiga unsur kepribadian yakni: *id*, *ego* dan *super-ego*. Yang oleh Sigmund Freud diartikan sebagai berikut: *id* adalah merupakan penggerak nafsu manusia, yang tidak mengenal baik dan buruk. *Id* merupakan penggerak utama perilaku manusia yang berada dalam ketidaksadaran. *Ego*

merupakan logika manusia yang muncul dari proses belajar manusia terhadap lingkungannya, umpamanya tentang baik dan buruk, benar dan salah. Ego merupakan alam kesadaran manusia. *Super-Ego* adalah alam ketidaksadaran yang berisi nilai-nilai positif, antara lain mengenai kebenaran dan kebaikan. Manusia biasa mengenal nurani, dan dalam setting lingkungan sosial berupa norma-norma masyarakat yang diendap oleh manusia selama proses belajar dari lingkungannya, terutama lingkungan masyarakat luas. Kadar dari ego dan super ego ini akan dapat mempengaruhi id dalam menimbulkan perilaku manusia. Jika lingkungan positif, maka ego dan super ego yang terbentuk juga positif, sehingga manakala ada keinginan id (yang tidak terpengaruh oleh baik dan buruk, atau benar dan salah), maka dapat diredam keinginan id tersebut, sesuai tidaknya dengan lingkungan sosialnya.

Disamping teori-teori tersebut, berikutnya adalah teori konflik. Menurut kerangka pemikiran Dahrendorf, konflik pada dasarnya mengikuti perspektif Marxis, dimana meluasnya konflik sosial karena adanya oposisi kepentingan kelas dan konsekuensi konflik dalam melahirkan perubahan sosial.

Dahrendorf menolak adanya tekanan kaum fungsional pada integrasi, nilai dan konsensus normatif, serta stabilitas, karena adanya ketidakseimbangan. Pendekatannya didasarkan pada asumsi bahwa semua sistem sosial yang ada dikoordinasikan secara imperatif dan bersifat otoriter. Seperti yang dikemukakannya bahwa otoritas merupakan suatu karakteristik dari organisasi sosial yang bersifat umum seperti yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri.

Sebagaimana halnya konsepsi kelas menurut Marx, maka Dahrendorf menerima adanya dua kelas dalam struktur sosial dan kaitannya dengan hubungan dinamika konflik. Perbedaan yang sistematis antara posisi seseorang yang berada pada posisi

tingkat paling tinggi yang melakukan otoritas pada semua asosiasi dan mereka tidak tunduk pada siapapun, sedangkan bagi mereka tunduk pada pihak lain di atasnya. Sedangkan mereka yang berada ditingkat bawah tidak memiliki otoritas terhadap orang lain dan hanya tunduk pada orang lain yang berada di atasnya.

Kepentingan kelas untuk mereka yang memiliki kekuasaan (berkuasa) yakni berusaha mempertahankan legitimasi posisinya yang dominan atau 'status quo' terhadap kepentingan kelas bawah. Adanya penyebaran otoritas merupakan dasar pembentukan kelas, yang selanjutnya menghasilkan model dua kelas.

Dalam konteks itu Dahrendorf mengemukakan dua kelompok kepentingan yang terdapat di masyarakat, yaitu : (1) kepentingan laten, adalah kepentingan kelas objektif yang ditentukan secara struktural yang tanpa disadari individu, (2) kepentingan manifest, adalah kepentingan kelas yang disadari individu terutama jika kepentingan tersebut dikejar sebagai tujuan. Kepentingan laten tidak dapat digunakan untuk membentuk kelompok, jadi setiap anggota yang dikoordinasi secara imperatif memiliki kepentingan latent, mereka disebut 'kelompok semu'.

Teori konflik Dahrendorf ini dimaksudkan untuk menjelaskan adanya kondisi-kondisi dimana kepentingan 'latent' berubah menjadi kepentingan 'manifest', dan 'kelompok semu' dapat diubah menjadi kelompok kepentingan yang bersifat 'konflik'. Kondisi seperti ini diklasifikasi ke dalam:

- (1) Kondisi teknis, yaitu kondisi yang diharapkan munculnya pemimpin dan pembentukan ideologi, dan hal ini penting guna pembentukan kelompok konflik dan tindakan kolektif;
- (2) Kondisi politik, yaitu kondisi yang diharapkan dapat menekan tingkat kebebasan yang ada guna pembentukan kelompok dan tindakannya;
- (3) Kondisi sosial, yaitu meliputi tingkat komunikasi diantara anggota dari suatu kelompok semu.

Adanya kondisi kepemimpinan, ideologi, kebebasan politik yang minimal, dan komunikasi internal merupakan prasarat dasar untuk pembentukan kelompok-kelompok konflik. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada diantara anggota kelompok semu, maka suatu kelompok konflik tidak akan dapat dibentuk. Selain itu juga bahwa kondisi tersebut diperlukan dalam pembentukan kelompok konflik, walaupun tidak bisa menjamin sepenuhnya, ini disebabkan masih ada persyaratan lain yang harus dipenuhi antara lain psikologi tertentu atau persyaratan sosiologis. Yang penting adanya kepentingan 'latent' menjadi kepentingan 'manifest'.

Intensitas dalam hal ini menunjuk pada pengeluaran energi dan tingkat keterlibatan dari pihak-pihak yang berkonflik, sedangkan kekerasan menunjukkan pada alat yang digunakan oleh pihak-pihak yang saling bertentangan untuk mengejar kepentingan. Sedangkan variabel yang mempengaruhi intensitas adalah tingkat kesamaan konflik dari berbagai asosiasi yang memiliki tingkat mobilitas tinggi. Tingkat kesamaan hirarki para anggota dari kelompok konflik yang sama berkonfrontasi dalam berbagai ragam hubungan asosiasi. Apabila mobilitas semakin meningkat maka solidaritas semakin digantikan dengan kompetisi individu dan energi yang dikeluarkan individu dalam konflik kelas akan semakin berkurang.

Intensitas dan kekerasan konflik dipengaruhi oleh penyebaran penghargaan, fasilitas, pemilikan dan status sosial yang ada. Makin besar kesamaan antara penyebaran otoritas dan penghargaan material, jaminan ekonomis dan status sosial, maka makin besar pula intensitas konflik.

Variabel penting lainnya yang mempengaruhi derajat kekerasan dalam konflik kelas adalah tingkat dimana konflik tersebut secara eksplisit di terima dan diatur. Penyatuan konflik sangat erat dengan aturan kondisi politik yang mempengaruhi kesadaran

kelas dan pembentukan kelompok kepentingan yang bersifat konflik.

Konflik yang berkepanjangan akan meledak dalam bentuk revolusioner yang keras, apabila tidak ada penyaluran dimana konflik tersebut dapat diatur dalam struktur yang ada. Keadaan ini biasanya terjadi pada suasana totaliter. Pada masyarakat demokratis, pengakuan yang eksplisit akan adanya kepentingan yang bertentangan dan pengembangan mekanisme pengaturan konflik, karena adanya pengaturan konflik akan mengurangi kekerasan.

Fungsi konflik dalam tatanan kehidupan masyarakat adalah menimbulkan perubahan struktur sosialisme, khususnya dalam hubungannya dengan struktur otoritas yang ada. Dalam ini, maka akan terdapat tiga tipe perubahan struktur yakni: (1) perubahan keseluruhan personal di dalam posisi dominasi; (2) perubahan sebagian personal dalam posisi dominasi; (3) penggabungan hanya kepentingan-kepentingan kelas subordinat dalam kebijaksanaan kelas yang berkuasa. Selain itu, maka perubahan struktur dapat terjadi karena sifat 'radikal' dan sifat 'tiba-tiba'. Keradikalan dan ketiba-tibaan dalam perubahan struktur berhubungan erat dengan intensitas dan kekerasan konflik kelas.

Dahrendorf menyebutkan bahwa pembentukan kelas dan konflik kelas dalam perspektif Marx terjadi pada kondisi-kondisi yang bersifat: (1) tidak adanya mobilitas; (2) tumpang tindihnya otoritas dan status sosial umumnya; (3) tumpang tindihnya konflik industri dan politik, dan (4) tidak adanya pengaturan konflik yang efektif. Jadi jelas bahwa kelas-kelas yang ada merupakan kelompok kepentingan konflik yang sangat intensif dan keras sehingga perubahannya terjadi secara tiba-tiba dan radikal.

Dilihat dari kerangka teori konflik, perilaku kekerasan adalah salah satu wujud adanya konflik sosial terbuka (baik benturan kepentingan laten maupun manifest), dimana terjadi saling bertentangan antara orang, kelompok dalam struktur sosial dan interaksi sosial tertentu. Dalam arti positif konflik sosial terbuka ini justru dapat

menghasilkan perubahan sosial. Oleh karena itu, maka konflik adalah sangat penting dalam menciptakan dinamika sosial. Hal ini diperkuat oleh asumsi-asumsi, bahwa : (1) setiap masyarakat kapan saja tunduk pada proses perubahan, dan perubahan sosial ada dimana-mana; (2) setiap masyarakat kapan saja memperlihatkan perpecahan dan konflik, dan konflik sosial ada di mana-mana; (3) setiap elemen dalam suatu masyarakat menyumbang disintegrasi dan perubahan; (4) setiap masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain.

'Perilaku kekerasan' adalah produk belajar

Dalam konteks fenomena kekerasan yang dilakukan warga masyarakat dalam perspektif kekinian, menunjukkan pola aksi yang membawa dampak bola salju, dalam arti bergulir dengan intensitas yang terus membesar dari sebuah titik kecil ke titik-titik yang membesar, dan bahkan seolah menjadi inspirasi pola tindak sebahagian warga masyarakat dalam menyelesaikan persoalannya, yaitu dengan kekerasan. Sehingga proses peniruan berlangsung terus, tidak saja oleh dewasa, bahkan remaja dan anakpun melakukan kekerasan. Seperti maraknya peristiwa unjuk rasa, kerusuhan massal, penjarahan yang juga diikuti atau melibatkan anak-anak. Itulah yang dinamakan oleh Albert Bandura sebagai 'Vicarius Learning'.

Dalam proses belajarnya manusia menurut 'Bandura' terjadi melalui pengamatan (*observasi*) subjek model. Proses belajar menurut pendekatan behavioris terjadi bila tingkah laku yang ditampilkan mendapat ganjaran (*reward*) sehingga tingkah laku tersebut dipertahankan, atau mendapatkan hukuman (*punishment*) sehingga tingkah laku yang ditampilkan tidak dipertahankan

Hukuman dan ganjaran yang terjadi dalam *Vicarius learning* tidak perlu dialami langsung oleh subjek. Sebagai contoh seseorang tidak perlu dipukul terlebih dahulu untuk mengetahui bahwa dipukul itu sakit, ia cukup mengamati orang lain yang menjerit kesakitan ketika dipukul. Proses serupa juga bisa terjadinya proses belajar tingkah laku kekerasan seperti perusakan yang dilakukan orang lain pada berbagai setting kerusuhan akhir-akhir ini adalah hasil belajar terhadap tingkah laku model mereka-yaitu orang lain, kelompok orang, bisa tokoh idola/model-yang menggunakan cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Saat ini pengguna kekerasan-baik dengan pengrusakan, pelemparan, maupun unjuk rasa massa-telah menjadi cara yang sangat efektif untuk mendapatkan tujuan.

Para pekerja harus melakukan gerakan demo dan pemogokan disertai kekerasan untuk memperoleh hak formalnya. Mahasiswa melakukan demonstrasi dengan kekuatan massa untuk mendesak penguasa. Pemerintah dan aparat menggunakan kekuatan pemukul untuk menangkal mahasiswa dan rakyatnya yang menyuarakan aspirasi. Dan atau penguasa (Eksekutif, Legislatif, yudikatif) tidak jarang menggunakan model kekerasan untuk memaksakan ide, program, dsb kepada rakyatnya.

Keseluruhan fenomena ini adalah contoh kekerasan yang teramati oleh seluruh warga masyarakat pemerhati peristiwa-peristiwa yang kini terjadi dan bahkan bisa jadi hal ini dijadikan sebuah model untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh setiap kelompok warga masyarakat, penguasa maupun aparat keamanan manakala ada keinginan dan kepentingan memperoleh solusi atas permasalahannya.

Implikasi fenomena itu, muncul kekhawatiran manakala tingkah laku kekerasan terinternalisasi dan menjadi pola baku yang digunakan dalam mencari solusi setiap permasalahan. Jika ini terjadi, maka kondisi kehidupan kemasyarakatan kita akan selalu chaos dan anarkis. Padahal kita tahu bahwa anarkisme adalah bukan ciri masyarakat modern dan beradab.

Atas dasar pendekatan *vicarious learning* dalam konteks antisipasi menghindarkan masyarakat dari pembentukan perilaku kekerasan adalah melalui:

- 1) Pemberian contoh, keteladanan berupa tingkah laku yang diinginkan sesuai kepribadian masyarakat beradab;
- 2) Konflik sosial yang ada diselesaikan dengan hubungan interpersonal yang baik;
- 3) Curahan kelembutan kasih sayang, dialog multikultural dalam memecahkan permasalahan lebih rasional di banding aksi kekerasan;
- 4) Idola tokoh elit masyarakat yakni : guru, orang tua, tokoh informal sebagai panutan yang dikagumi dalam proses belajar adalah salah satu pilihan signifikan untuk menjadi model.

Dengan cara itu diharapkan kita bisa terhindar dari kristalisasi bentukan perilaku kekerasan yang memprihatinkan pada anak, remaja, orang dewasa dan seluruh warga masyarakat.

Kesimpulan dan Implikasi

1. Tindakan kekerasan dari seseorang kepada orang lain, dari suatu kelompok kepada kelompok lainnya dengan motif apapun, adalah perilaku menyimpang dan tidak bisa dibenarkan menurut norma-norma sosial, tetapi fenomena kekerasan itu banyak dilakukan oleh individu, kelompok dan institusi masyarakat hingga kini tetap saja berlangsung.
2. Fenomena tindakan kekerasan kini menunjukkan grafik menaik seiring laju proses reformasi, tampak bahwa kekerasan dan reformasi sangat kontradiktif, tindakan kekerasan seolah-olah dianggap sebagai sebuah kebiasaan baru dalam menyelesaikan masalah sosial yang muncul dan berkembang di masyarakat.
3. Bentuk kekerasan memiliki ragam wujud tindakan yang multidimensional, dan akumulasi tindakan kekerasan yang terjadi di

Indonesia telah membawa kepada suatu situasi yang mencekam dan selalu dicermati oleh pihak luar. Dalam setiap tindakan kekerasan (individual, massal, instansional) cenderung menggunakan hukum rimba, dan saling balas sebagai ungkapan rasa solidaritas

4. Dari tahun 1996- hingga kini, tindakan kekerasan itu meliputi : (1) tawuran antar pelajar, dan antar supporter (di kota, di pelosok) yang tidak kunjung berhenti; (2) peristiwa kampanye Pemilu; (3) kerusuhan rasial; (4) akibat demonstrasi mahasiswa; dan (5) perampokan, perkosaan, penculikan dan dukun santet.
5. Faktor-faktor dasar yang menjadi pemicu munculnya tindakan kekerasan, karena : (1) kesenjangan atau kecemburuan sosial; (2) memperjuangkan demokrasi dan keadilan; (3) merupakan bagian dari skala besar reformasi dan pembangunan bangsa; (4) tindakan spontan emosional dari sebahagian individu, kelompok yang marah karena terpengaruh isu; (5) kekerasan dengan konflik agama.
6. Solusi tepat untuk cegah dini munculnya dan untuk mengatasi perilaku kekerasan adalah suatu gerakan kebudayaan yang dapat mengembalikan kesadaran kemanusiaan, dan agresivitas kekerasan yang disebabkan oleh kesenjangan kesadaran perilaku.
7. Gerakan kebudayaan itu adalah mengolah dimensi kedalaman manusia, yaitu sebuah transendensi, etika dan moral, serta pengembangan estetika yang jangka panjang dapat menaikkan kembali kesadaran manusia yang berbudaya.
8. Gerakan itu hanya akan efektif, jika dilakukan melalui upaya-upaya pendidikan, dalam arti luas, menyeluruh, dan integratif, dimana seluruh potensi institusi sosial berfungsi secara baik.

Daftar Pustaka

- Amri Mazali, "Tekanan Penduduk, Kompetisi atas Sumber Daya, dan Kerusuhan Masal" dalam Masyarakat Indonesia Jilid XXIII, No. 2, 1997, Jakarta:LIPI.

- Ikrar Nusa Bhakti dan Moch. Nurhsim, "Kekerasan Masa: Hipotensis dan Analisis Isi", dalam Masyarakat Indonesia Jilid XXIII, No. 2, 1997, Jakarta: LIPI.
- Judistira K. Garna. (1996). Ilmu-ilmu Sosial, Dasar-Konsep-Posisi, Bandung:PPS UNPAD.
- (1996) Sistem Budaya Indonesia, Bandung: PPS UNPAD.
- (1997) Pemikiran Modern dan Ilmu Pengetahuan Sosial, Bandung: Primaco Akademika.
- Koentjaraningrat, (1987) Sejarah Teori Antropologi, Jakarta: UI Press.
- Koentjaraningrat, (1990) Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Binacipta.
- Sutan Takdir Alisyahbana, (1986), Antropologi Baru, Jakarta: PT, Dian Rakyat.
- Usman Pelly dan Asih Menanti (1994) Teori-teori Sosial Budaya, Jakarta: Ditjen Dikti.
- , Kompas, 9 Oktober 1988: 14,15,16 Desember 1998
- , Republika: 9 Oktober 1998.
- , Pikiran Rakyat, 19 Januari 1999